

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH Universitas: Surabaya.
- Bambang Waluyo, 2016 *Penegakan Hukum di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, Citra Aditya Bandung.
- Dellyana Shant, 1988 *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Djainul Arifin, 2014, *Pengawasan Kemetrolgian, Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian*.
- Eden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama: Bandung.
- Heny Suksesi, 2013, *Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang , dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Dalam Pedaganagan Barang*, Pusat Perdagangan Dalam Negeri: Jakarta.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imayanti, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, mandar maju: Bandung.
- Irwansyah Syahrani, 2018, *Modul Administrasi Transaksi XI*, Yogyakarta: Deepublish.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus 2020, *Penelitian Hukum pilihan metode & praktik penulisan artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media
- John Birch, 2003, *Benefit of Legal Metrology for the Economic and Society, A Study for the International Committee of Legal Metrology*.
- Josef Riwu Kaho, 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada
- Martin Kellerman, 2019 *International Development in Practice: Comprehensive Diagnostic Tools*, (Washington DC: International Bank

for Reconstruction and Development / The World Bank and Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).

- Moeljatno, 2005, *Asas Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P. A. F Lamintang, 1997, *Dasar –Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Preben Howarth, 2008, *Metrology – in Short 2 Edition*, terj. A. Praba Drijarkara, Jakarta: Puslit KIM-LIPI.
- R Tresna, 1990, *Asas – Asas Hukum Pidana Cetakan Ke 3*, Tiara Ltd: Jakarta.
- Ramly Hutabarat, 1985 *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Salim Hs, Penerapan 2016 Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disetasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Raja Grafindo: Jakarta.
- Tongat, 2010, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press: Malang.

Karya Tulis

- Analisis Penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) dalam perdagangan barang. 2013, Pusat Kebijakan Perdagangan dalam negeri badan pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan kementerian perdagangan.
- Andi Desmon, 2019 *Pengaturan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Oleh Dprd Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jurnal UNES Swara Justitia, Padang
- Dine Ewantara, Irfan Ridwan Maksum, 2019. *Perbandingan Urusan Metrologi Legal Indonesia dan Belanda*. Jurnal Administrasi Pubil Universitas Medan Area.
- Diana, 2019, *Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30*

- Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan di Kota Batam)*,
Jurnal Universitas Internasional Batam
- Firda Novi Lestari, Ahzid, 2018. *Analisis Perbandingan Pengujian Timbangan Elektronik Menggunakan Syarat Teknis NO.131/SPK/KEP/10/2015 dan Perhitungan Limit of Performance (LOP)*. Universitas Gajah mada.
- Florianus Yudhi Priyo Amboro, Lily Persyadayani. *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah Di Kota Tanjung Pinang*. Jurnal Of Law and Policy Transformation 2021 Hal 120
- I. Dewa Komang Ary Gunartha, Nyoman Djinar Setiawina, 2013, *Analisis Potensi Retribusi, Efektifitas, Efisiensi Dan Kinerja Pelayanan Tera Dan Tera Ulang Pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Provinsi Bali*. E Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Laporan Kinerja Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan tahun 2020
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
- Muldri Pudamo James Pasaribu, 2020, *Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Metrologi Legal Untuk Mewujudkan Perdagangan Yang Adil Dan Aman (Fair And Safe Trade)*. Disertasi Universitas Sumatera Utara Medan.
- Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal*.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2014, *Laporan Analisis: Evaluasi Kinerja UPT/UPTD Dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan*, Jakarta.
- Suharliati Nelsy Husain, Hafied Cangara, Tuti Bahfiarti. *Tingkat Pemahaman Dan Perilaku Tentang Informasi Penggunaan Alat Ukur Timbangan Di Kalangan Pedagang Eceran Pada Dua Pasar Tradisional Di Makassar*. Jurnal Komunikasi KAREBA UNHAS Vol.7 No.1 Januari – Juni 2018
- Suharyo, 2015. *Pembentukan Peraturan Daerah, dan Penerapan Sanksi Pidana serta Problematikanya*. Jurnal Rechtsvinding.
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, 1987, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press.

Website

Husein A Akil, *Kepala Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pappiptek)*, LIPI Sumber : Media Indonesia, 20 Mei 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBi) Situs WEB Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/budaya>.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BSN Zul Amri dalam Hari Metrologi Dunia 13 Mei 2022. BSN <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/12891/bsn-di-hari-metrologi-dunia>

Rappler.com, *5 Hal Mengapa Tera Timbangan Penting: Jangan Menimbang Dengan Curang*, rappler.com/indonesia/125058-5-hal-tera-timbangan-penting-jangan-curang.

Siaran Pers Kementerian Perdagangan. Kasus SPBU Nakal di Bali dinyatakan P21. https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/ckgBYrJLURKUTSxeHKjw2SUEUilX8sHj15DctR2Y.pdf

Situs web Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Negara <http://sppk.kemendag.go.id/pages/faq>

Situs web Badan Perlindungan Konsumen Nasional <https://bpkn.go.id/posts/show/id/2040>, BPKN terima 1.276 laporan selama 2020.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi legal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan polisi pamong Praja

Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Permendag NO. 67 Tahun 2018 Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulan

Permendag No. 68 Tahun 2018 Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya

Permendag No. 118 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal

Permendag No. 27 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal

Peraturan Walikota Makassar No. 82 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 26660/S.01/PTSP/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan PPs Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Makassar Nomor : 1432/UN4.5.1/PT.01.04/2022 tanggal 08 Februari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : FACHRI MUHAMMAD B
Nomor Pokok : B012201035
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

" PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL DI WILAYAH HUKUM KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Februari s/d 30 April 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 Februari 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
1. Dekan PPs Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar.
2. *Pertinggal*.

SIMAP PTSP 11-02-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Rappocini Raya Nomor 219 Makassar Kode Pos 90222
Email: disdagmakassar@gmail.com Home Page: www.makassarkota.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 13 / Disdag / III /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : FACHRI MUHAMMAD B
No.Pokok : 012201035
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Mahasiswa (S2) / UNHAS
Judul Penelitian : "PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL DIWILAYAH HUKUM KOTA MAKASSAR"

Benar telah melakukan penelitian pada Dinas Perdagangan Kota Makassar sesuai judul penelitian tersebut diatas.

Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai kelengkapan menyelesaikan kuliah.

Makassar, 17 Maret 2022

An, KEPALA DINAS
SEKRETARIS



Muh. Akil Akbar, S.H.
NIP. 19690126 199003 1 002



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : SKP / 72 / III / 2022 / SDM

1. Rujukan:

- a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar nomor: 27628/S.01/PTSP/2022 tanggal 08 Maret 2022 perihal permohonan izin penelitian.
- b. Surat Disposisi Kapolrestabes Makassar nomor: B/432/III/2022/SIUM tanggal 10 Maret 2022 perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : FACHRI MUHAMMAD B
Nomor : B012201035
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat kampus : JL. PRINTIS KEMERDEKAAN NO KM.10 MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul

"PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL DI WILAYAH HUKUM KOTA MAKASSAR"

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 23 Maret 2022

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM




H. RISMAN SANI S.Ag

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050427

Tembusan:

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fakultas Hukum UNHAS Makassar